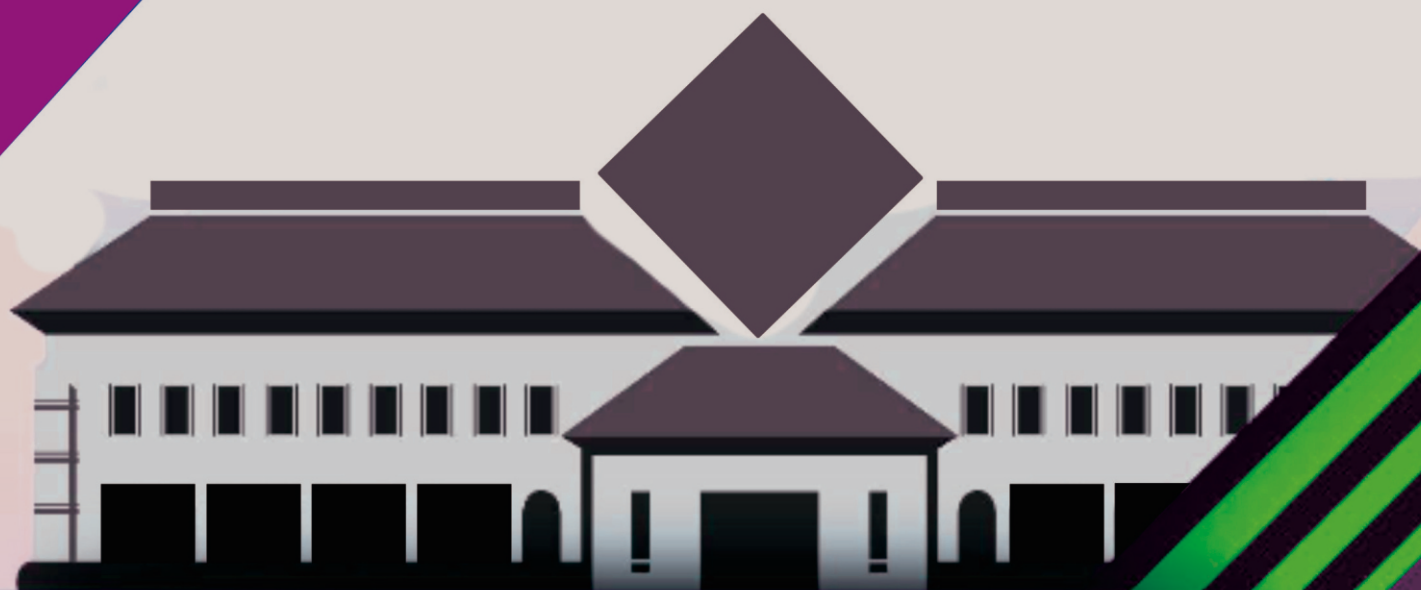




BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024 - 2026

BAPPEDALITBANG

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dapat terselesaikan. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDALITBANG sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 3 (tiga) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 3 (tiga) tahunan yang akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Tahun 2024-2026 ini, peran BAPPEDALITBANG sebagai pengambil kebijakan, koordinator perencanaan pembangunan daerah serta pusat penelitian dan pengembangan semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Disadari dokumen ini belum sempurna, untuk itu diharapkan masukan dari pihak-pihak terkait guna perbaikan di masa mendatang. Atas partisipasi dan dukungannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN LAMANDAU,



Drs. ABISUA, M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Dokumen Rencana Strategis
BAB II	GAMBARAN UMUM
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2	Penentuan isu-isu strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	13
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	14
Tabel 2.3	Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan	15
Tabel 2.4	Daftar Inventaris Barang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau	15
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	18
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023	22
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	25
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAEPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau 2024-2026	27
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	29
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang tersebut, bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada publik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau sebagai salah satu Perangkat Daerah sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional dan global.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Bupati/Walikota yang masa jabatannya Berakhir pada tahun 2022 perlu Menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 yang diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau disinkronkan dengan isu strategis RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Penyusunan rencana aksi dengan mempertimbangkan potensi sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, peralatan yang dimiliki dan potensi lain. Dengan melihat potensi tersebut akan dapat mengukur kemampuan tiap tahun dalam penentuan target yang akan dicapai.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145).
29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman umum dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamandau.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah:

- a) Menjamin konsistensi perencanaan teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau sebagaimana dijabarkan di dalam RPD Kabupaten Lamandau;

- b) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- c) Menetapkan Arah Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau yang mengacu kepada RPJPD dan RPD Kabupaten Lamandau serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

1.4 Sistematika Dokumen Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RPD, dan dengan Renja Perangkat Daerah serta sistematika dokumen Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dianggap prioritas untuk diselesaikan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau yang akan dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau

2.1.1 Tugas dan Fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau, bahwa organisasi perangkat daerah ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan perencanaan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau antara lain :

- a) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang Pengkoordinasian penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD serta sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta harmonisasi dengan dokumen RTRWK;
- c) pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat serta swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional;
- d) penyelenggaraan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, pusat- pusat kajian atau lembaga penelitian dalam mengembangkan potensi dan daya saing daerah;
- e) pengendalian dan evaluasi konsistensi dan kesesuaian program dan kegiatan pada RPJMD dengan RKPD dan dengan KUA dan PPAS serta dokumen APBD;
- f) pengendalian dan evaluasi capaian sasaran target pada RPJMD setiap tahun pelaksanaan APBD;
- g) pemantauan dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h) pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
- i) pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan

- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Sebagai unsur penunjang perencanaan pembangunan, urusan penunjang bidang penelitian pengembangan daerah dan membantu Bupati, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau terdiri dari :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan integratif, spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) pengkoordinasian penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD serta sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta harmonisasi dengan dokumen RTRWK;
- c) pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat serta swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional;
- d) penyelenggaraan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, pusat- pusat kajian atau lembaga penelitian dalam mengembangkan potensi dan daya saing daerah;
- e) pengendalian dan evaluasi konsistensi dan kesesuaian program dan kegiatan pada RPJMD dengan RKPD dan dengan KUA dan PPAS serta dokumen APBD;
- f) pengendalian dan evaluasi capaian sasaran target pada RPJMD setiap tahun pelaksanaan APBD;
- g) pemantauan dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h) pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
- i) pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
- j) pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas untuk mengoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b) menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c) pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d) penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e) penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;
- f) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- g) pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h) pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i) pelaksanaan urusan pengelolaan / administrasi keuangan;
- j) pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan karier;
- k) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris BAPPEDALITBANG dibantu oleh:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Keuangan dan Aset;

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan dalam perencanaan, perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian, fasilitasi, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, evaluasi dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan informasi pembangunan daerah, serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program, kegiatan bidang penyusunan program, kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b) perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, data dan informasi pembangunan daerah;
- c) pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e) pengkoordinasian dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- f) penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- g) pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h) pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i) mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j) penyajian/publikasi data informasi pembangunan daerah melalui media cetak atau media elektronik;
- k) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- l) pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m) penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan membantu kepala badan dalam merumuskan, menyusun kebijakan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi; pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan, sosial, kebudayaan, administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program, kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b) pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c) pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d) pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h) pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- j) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan membantu Kepala dalam merumuskan dan menyusun serta koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, perdagangan, perindustrian, koperasi UKM, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program, kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b) pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c) pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d) pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- f) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h) pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- j) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

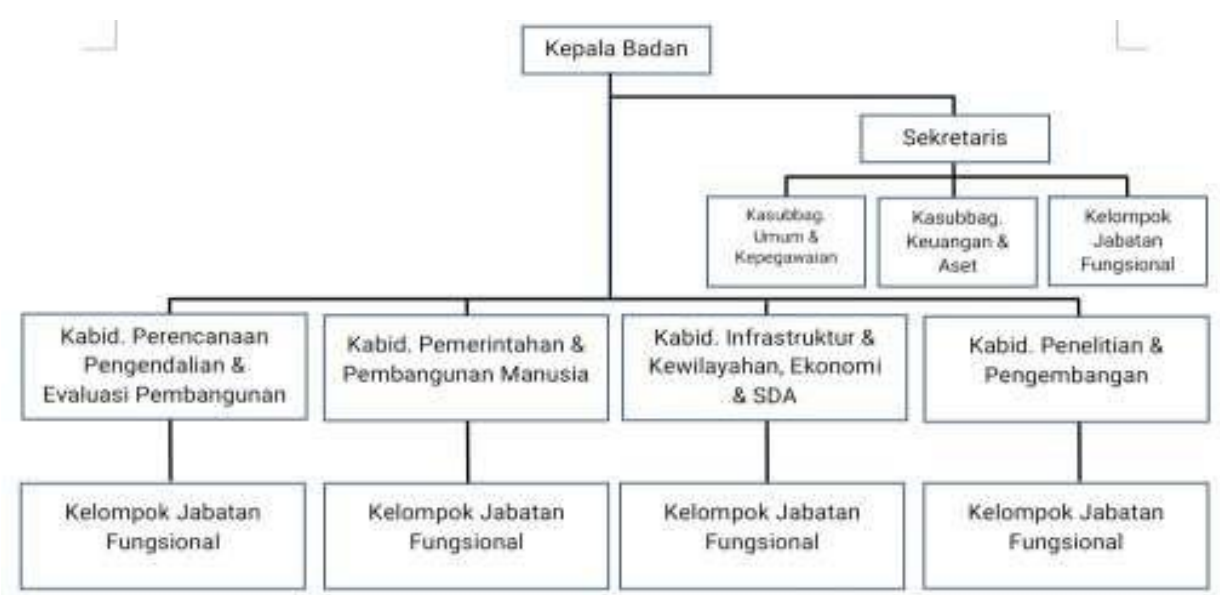
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan membantu kepala badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program, kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
- b) penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- c) penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- d) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
- e) pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- f) pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- g) pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
- i) pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- j) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dibagi dalam susunan organisasi seperti yang tertera pada bagan berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau, didukung dengan aparatur berjumlah 24 orang. Komposisi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	1	1	6	9
3	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-	1	-	2	1	4
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	-	2	2	5
5	Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	-	1	2	4
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	-	1	-	2
	Jumlah	1	5	1	7	11	25

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, Sekretariat masih diisi oleh 1 orang yang menduduki jenjang Eselon IV, sehingga bila dilihat berdasarkan gambar struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau memungkinkan untuk penambahan 1 orang yang menduduki jenjang eselon IV.

Sedangkan pada bidang-bidang berdasarkan table 2.1 untuk Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Bidang Penelitian dan Pengembangan hanya memiliki 1 Pejabat Fungsional pada masing-masing bidang.

Sehingga bila dilihat berdasarkan gambar struktur organisasi memungkinkan untuk penambahan masing- masing 1 orang yang menduduki jenjang Pejabat Fungsional.

Kondisi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	SMA	Jumlah
1	Kepala	-	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	2	3	4	-	9
3	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-	-	4	-	-	4
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	4	-	1	5
5	Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	-	3	-	-	4
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	1	-	-	2
	Jumlah	1	4	15	4	1	25

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat Pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau yang paling banyak adalah Pendidikan S-1 sebanyak 15 orang (60%). Tingkat Pendidikan pegawai yang relatif tinggi ini, merupakan modal dasar yang penting sebagai sumber daya manusia dalam kinerja secara umum. Hal ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan secara optimal.

Untuk mendukung kelancaran tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dibantu oleh Pegawai tidak tetap dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No.	Uraian	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	3	1	6	-	-	10
2	Sopir	-	-	1	-	-	1
3	Tukang Kebun	-	-	-	2	-	2
4	Cleaning servis	-	-	1	-	1	2
5	Penjaga Malam	-	-	1	-	-	1
6	Pengelola Aula	-	-	2	-	-	2
7	Satpam	-	-	-	1	-	1
	Jumlah	3	1	11	3	1	19

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja dalam mekanisme pencapaian target kinerja. Adapun daftar inventaris Barang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau, dapat dibaca sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Daftar Inventaris Barang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	AC. Split	25 Unit
2	AC. Standing floor	4 Unit
3	Alat Pembersih / Vocum cleaner	2 Buah
4	Alat Penghancur Kertas	1 Buah
5	Brankas	1 Buah
6	Busa sofa	1 Set
7	Camcoder (Alat Studio Lainnya)	1 Unit
8	CCTV Camera Control Television System	1 Unit
9	Dispenser	3 Buah
10	Display Room	1 Buah
11	Filing Cabinet	13 Buah
12	Gambar Bupati dan Wakil Bupati	2 Buah
13	Gambar Gubernur dan Wakil Gubernur	2 Buah
14	Gambar Prisiden dan Wakil Prisiden	2 Buah
15	Gelas Piala	1 Set
16	Gorden	1 Set
17	GPS	1 Buah
18	Hardisk External	10 Buah
19	Jam Dinding	8 Buah
20	Kamera	3 Buah
21	Kipas Angin	3 Buah
22	Komputer	8 Unit
23	Kursi Eselon III	8 Buah
24	Kursi Kerja Eselon II	1 Buah
25	Kursi kerja eselon IV	7 Buah
26	Kursi Lipat	150 Buah

27	Kursi Pimpin Rapat	4 Buah
28	Kursi Putar	2 Buah
29	Lambang Geruda Uk. Besar	1 Buah
30	Lambang Geruda Uk. Kecil	4 Buah
31	Laptop / Note Book	21 Unit
32	Layar Proyektor	3 Buah
33	Lemari Arsip Besi	7 Buah
34	Lemari Buku	4 Buah
35	Lemari Es / Kulkas	1 Buah
36	Lemari Kaca	4 Buah
37	Lemari Kayu	13 Buah
38	Lensa Kamera	3 Buah
39	Meja 1/2 Biro	20 Buah
40	Meja Kerja 1/2 Biro	8 Buah
41	Meja Kerja eselon III	2 Unit
42	Meja kerja Eselon IV	6 Unit
43	Meja Panjang	15 Buah
44	Meja Podium	1 Buah
45	Mesin Absensi	1 Buah
46	Mesin Laminating	1 Buah
47	Mesin Pemotong Rumput	2 Buah
48	Mesin Penghitung Uang	1 Buah
49	Mesin Pompa Air	1 Buah
50	Meubeleur HPL	1 Set
51	Mickrophone podium	4 Buah
52	Mickrophone portable	2 Buah
53	Microphone portable	1 Set
54	Monitor CCTV	1 Set
55	Papan Imformasi / Publikasi	1 Buah
56	Papan Informasi	1 Buah
57	Papan Nama Instansi	1 Buah
58	Papan Visual/Papan Nama	1 Buah
59	Pompa Air	1 Buah
60	Printer	28 Buah
61	Projector / LCD	4 Buah
62	Rak Book File	4 Buah
63	Rak Buku	1 Buah
64	Rak Piring	2 Buah
65	Router	1 Buah
66	Saund sistem set	1 Set
67	Scanner Portable	1 Set
68	Sopa / Meja tamu	5 Set
69	Speaker Komputer	2 Buah
70	Tabung Pemadam Kebakaran	4 Buah
71	Tangga Alumunium	1 Buah
72	Telepon / Fax	1 Unit
73	Tempat Sampah Stainless	6 Buah
74	Teralis	1 Set
75	Tiang dan Bendera Daerah	1 Buah
76	Troli Dorong	2 Buah
77	TV	1 Unit
78	TV Layar besar	1 Unit
79	UPS / Stabilizer	15 Buah
80	Wirrorless / Kamera	1 Buah
81	With Laser Pointer Wireless	1 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dapat di kategorikan pada 7 (tujuh) peran utama yang saling terkait, yaitu:

- 1) Sebagai pengambil kebijakan;
- 2) Koordinator perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Pusat penelitian dan pengembangan daerah;
- 4) Pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan;
- 5) Pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana pada bidang perhubungan, komunikasi, informatika, pekerjaan umum;
- 6) Penghimpunan data, informasi, dokumentasi berkaitan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah;
- 7) Koordinator penyusunan data pokok, pengendalian program, pelaporan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 7 (tujuh) tugas dan fungsi utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau, berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi periode 2018-2023 disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
			Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A				100		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA		2	2	2	2	2	2	2	2	2		100	100	100	100	
			Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
			Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPDP		1	1	1	1	1	1	1	1	1		100	100	100	100	
			Penjabaran konsistensi program RKPDP kedalam APBD		1	1	1	1	1	1	1	1	1		100	100	100	100	
			Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		1	1	1	1	1	1	1	1	1		100	100	100	100	

			Penerapan SIDA		N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	1	1				100	100	
			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		5	13	20	25		5	13	20	25		100	100	100	100	
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100				100	100	
			Persentase implementasi rencana kelitbangan		N/A	N/A	90	90	90	N/A	N/A	90	90				100	100	
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100				100	100	
	Nilai SAKIP				CC	B	B			B	B	B			100	100	100		
	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah dan Tahunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100	100	100			100	100	100			100	100	100		
	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Selaras, Konsistensi dan Terukur (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja)				100	100	100			100	100	100			100	100	100		
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan menjadi inovasi				100	100	100			100	100	100			100	100	100		
	Indeks Perencanaan							90	90,5										

	Terpenuhinya nilai perencanaan pada nilai SAKIP							20	20,5										
	Persentase pencapaian target kinerja RPJMD							93,5	94										
	Persentase RKPD, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RPJMD							98	98,5										
	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RKPD							98,5	100										
	Persentase target tahunan daerah yang tercapai							91,5	92										
	Persentase hasil Persentase Kajian Litbang IPTEK yang dimanfaatkan untuk mendukung sasaran RPJMD							100	100										

Berdasarkan data capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau tahun 2018-2023, capaian kinerja pada Indikator Kinerja Sasaran yang dikelola menunjukkan trend positif.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.238.599.591	6.207.384.875	5.888.731.318	5.770.813.791	6.897.634.914	6.887.765.878	5.524.698.592	5.162.483.787	5.175.361.244		83,60%	89%	87,67%	89,68%			

Hasil analisa tabel diatas mengungkapkan bahwa, capaian anggaran sebagian besar kegiatan pada program telah terserap dengan baik berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau selama tiga tahun mendatang.

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau, meliputi:

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan yang ada di dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau;
- 2) Banyak peraturan perundangan yang terus mengalami perubahan di dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Ketidapatuhan aparatur OPD dalam menjalankan hasil evaluasi, monitoring, laporan dan hasil-hasil analisa yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau sehingga mempengaruhi hasil dari perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Tidak semua program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dapat tertampung pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau, meliputi:

- 1) Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian yang ada sehingga maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada;
- 2) Peningkatan profesionalisme pegawai serta melakukan inovasi pelayanan dan Good Governance (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) melalui pelaksanaan bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya;
- 3) Dukungan dan Koordinasi antar pelaku pembangunan sebagai mitra pembangunan seperti masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat;

- 4) Penerapan teknologi informasi dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja, sehingga dapat memenuhi tujuan efektifitas dan efisiensi kebutuhan perencanaan;
- 5) Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan pengawai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2022, disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau menyelenggarakan tugas dan fungsi memimpin pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan integratif, spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, masih banyak menghadapi permasalahan dalam mencapai sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lamandau. Masalah tersebut disebabkan belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya regulasi, inisiatif, dan kebijakan dari pemerintah daerah. Adapun akar permasalahan yang menyebabkan terjadi masalah diatas yaitu :

- 1) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan;
- 4) Rendahnya kapasitas sumber daya perencana perencanaan pembangunan; dan
- 5) Partisipasi perangkat daerah dalam inovasi daerah masih belum optimal.

Keterkaitan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum tercapainya sasaran pembangunan daerah	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah; - Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi

		kebijakan pembangunan daerah; - Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan; - Rendahnya kapasitas sumber daya perencana perencanaan pembangunan; dan - Rendahnya inovasi daerah
--	--	---

3.2 Penentuan isu-isu strategis

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau dalam mendukung pencapaian RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 antara lain :

1. Dokumen yang menjadi pedoman belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan;
2. Standar pengendalian dan evaluasi belum akuntabel;
3. Kurang meratanya infrastruktur teknologi;
4. Kualitas pengelolaan data dan informasi masih kurang;
5. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia; dan
6. Kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan masih rendah.

Sedangkan factor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau dalam mendukung pencapaian RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 antara lain :

1. Kerjasama teknokratik;
2. Kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan stakeholder;
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rutin dilaksanakan;
4. Adanya sistem dan aplikasi perencanaan yang dapat diintegrasikan;
5. Perbaikan kualitas data dan informasi rutin dilakukan;
6. Pelaksanaan diklat teknis untuk peningkatan kualitas SDM; dan
7. Perbaikan kelembagaan perencanaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2022, disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau menyelenggarakan tugas dan fungsi memimpin pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan integratif, spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

Mengacu pada RPD, maka tujuan BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau yang hendak dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan yaitu : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, dengan sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja, 2. Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAEPEDALITBANG Kabupaten Lamandau 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas		Indeks Perencanaan	91	92	93
		1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	21	22	23
		2. Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah	Persentase Inovasi hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau mencapai tujuan dan sasaran Renstranya serta mendukung pencapaian RPD dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada BAPPEDALITBANG agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan.

Strategi dan Arah Kebijakan BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026, tertuang dalam tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintah dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi				
Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Identifikasi kebutuhan perencanaan	Penyusunan dokumen perencanaan
			Meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Perbaikan kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan para pihak terkait
			Membangun kemitraan koordinatif integratif dan sinergis	Melaksanakan koordinasi, sinkronasi dan integrasi perencanaan pembangunan
			Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengendalian pencapaian perencanaan tahunan daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pembangunan daerah
		2. Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas kajian perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan kajian yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah
			Merumuskan hasil-hasil kajian sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan
			Membangun jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik	Melaksanakan koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Secara detail, penjabaran dari program, kegiatan, sub kegiatan indikator, dan target indikator serta kerangka pendanaan BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 terangkum dalam tabel 6.1, sebagaimana terlampir.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
											Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja							Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A		91		92		93		93	
								Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	N/A		21		22		23		23	
		5	01					PERENCANAAN				1.423.464.580		1.490.000.000		1.284.000.000		4.197.464.580
		5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPD yang selaras dengan RKPD	N/A	100%	548.464.580	100%	575.000.000	100%	354.000.000	100%	1.477.464.580
									Persentase Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Tercapai	N/A	93%	450.000.000	93%	450.000.000	93,5%	450.000.000	93,5%	1.350.000.000
		5	01	02	201			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	N/A	100%	388.464.580	100%	415.000.000	100%	194.000.000	100%	997.464.580
		5	01	02	201	01		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	N/A	3 Dokumen	190.464.580	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	300.464.580
		5	01	02	201	03		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	N/A	3 B erita Acara	30.000.000	2 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	20.000.000	6 Berita Acara	80.000.000
		5	01	02	201	04		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	N/A	1 Berita Acara	10.000.000	1 Berita Acara	10.000.000	1 Berita Acara	14.000.000	3 Berita Acara	34.000.000
		5	01	02	201	05		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	N/A	2 Berita Acara	3.000.000	2 Berita Acara	10.000.000	2 Berita Acara	5.000.000	6 Berita Acara	18.000.000
		5	01	02	201	06		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	N/A	1150 Usulan	5.000.000	1050 Usulan	5.000.000	1000 Usulan	5.000.000	3200 Usulan	15.000.000
		5	01	02	201	07		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	N/A	2 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	550.000.000
		5	01	02	202			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang termuat dalam Buku Profil	N/A	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000
		5	01	02	202	03		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	N/A	1 Buku	100.000.000	1 Buku	100.000.000	1 Buku	100.000.000	3 Buku	300.000.000
		5	01	02	203			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	92,50%	450.000.000	93,00%	450.000.000	93,50%	450.000.000	93,50%	1.350.000.000
		5	01	02	203	01		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	N/A	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	36 Laporan	450.000.000
		5	01	02	203	03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	N/A	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	9 Laporan	900.000.000
		5	01	02	204			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase hasil implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	N/A	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	180.000.000
		5	01	02	204	02		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	N/A	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	90.000.000
		5	01	02	204	03		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	90.000.000
		5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renstra/Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Selaras dengan RPD/RKPD	N/A	100%	425.000.000	100%	465.000.000	100%	480.000.000	100%	1.370.000.000
									Persentase Dokumen Renstra/Renja Bidang Perekonomian dan SDA yang Selaras dengan RPD/RKPD	N/A	100%		100%		100%		100%	
									Persentase Dokumen Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Selaras dengan RPD/RKPD	N/A	100%		100%		100%		100%	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
											Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
		5	01	03	201			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang didampingi	N/A	100%	145.000.000	100%	165.000.000	100%	160.000.000	100%	470.000.000
		5	01	03	201	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	N/A	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	3 Laporan	120.000.000
		5	01	03	201	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	N/A	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	3 Laporan	110.000.000
		5	01	03	201	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	N/A	-		8 Laporan	20.000.000	-		8 Perangkat Daerah	20.000.000
		5	01	03	201	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	N/A	8 Perangkat Daerah	35.000.000	8 Perangkat Daerah	35.000.000	8 Perangkat Daerah	40.000.000	8 Perangkat Daerah	110.000.000
		5	01	03	201	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	N/A	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	3 Laporan	110.000.000
		5	01	03	202			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang didampingi	N/A	100%	140.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	460.000.000
		5	01	03	202	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	115.000.000
		5	01	03	202	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	N/A	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	3 Laporan	115.000.000
		5	01	03	202	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	115.000.000
		5	01	03	202	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	N/A	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	3 Dokumen	115.000.000
		5	01	03	203			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan yang didampingi	N/A	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	160.000.000	100%	440.000.000
		5	01	03	203	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	110.000.000
		5	01	03	203	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	N/A	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	3 Laporan	110.000.000
		5	01	03	203	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayahahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayahahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	110.000.000
		5	01	03	203	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayahahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayahahan	N/A	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	3 Laporan	110.000.000
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan								Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan	N/A	100%		100%		100%		100%	-
		5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			100%	440.000.000	100%	405.000.000	100%	650.000.000	100%	1.495.000.000
		5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Penelitian dengan Arah Kebijakan Perencanaan RKPD	N/A	100%	440.000.000	100%	405.000.000	100%	650.000.000	100%	1.495.000.000
		5	05	02	201			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Capaian Pelaksanaan Penelitian Strategis dan Pengelolaan Buletin Kelitbangan	N/A	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	290.000.000	100%	495.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
										Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
		5	05	02	201	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	N/A		-		-	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	180.000.000
		5	05	02	201	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	N/A	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	110.000.000	3 Laporan	315.000.000
		5	05	02	202		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan dalam Perencanaan	N/A	100%	240.000.000		-	100%	180.000.000	100%	420.000.000
		5	05	02	202	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	N/A	1 Dokumen	240.000.000		-	-	-	1 Dokumen	240.000.000
		5	05	02	202	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	N/A	-	-		-	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000
		5	05	02	203		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam Perencanaan	N/A		-	100%	200.000.000		-	100%	200.000.000
		5	05	02	203	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	N/A		-	1 Dokumen	200.000.000		-	1 Dokumen	200.000.000
		5	05	02	204		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam inovasi Daerah	N/A	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	180.000.000	100%	380.000.000
		5	05	02	204	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat inovatif	N/A	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 Laporan	300.000.000
		5	05	02	204	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	N/A	-	-	-	-	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000
		5	05	02	204	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	N/A	-	-	-	-	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000
		X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Bappedalitbang	N/A	BB	5.074.634.914	BB	5.026.776.636	A	5.012.002.854	A	15.113.414.404
		X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	N/A	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	16.000.000	100%	46.000.000
		X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	3 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	13.000.000
		X	XX	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A	4 Dokumen	8.000.000	4 Dokumen	8.000.000	4 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	24.000.000
		X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	3 Laporan	9.000.000
		X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	N/A	100%	2.935.134.914	100%	2.992.276.636	100%	3.034.002.854	100%	8.961.414.404
		X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	350 Orang / Bulan	2.935.134.914	350 Orang / Bulan	2.992.276.636	350 Orang / Bulan	3.034.002.854	350 Orang / Bulan	8.961.414.404
		X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Bimtek/ Pelatihan	N/A	100%	113.000.000	100%	113.000.000	100%	113.000.000	100%	339.000.000
		X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	3 Paket	48.000.000	3 Paket	48.000.000	3 Paket	48.000.000	9 Paket	144.000.000
		X	XX	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	15 Orang	65.000.000	15 Orang	65.000.000	15 Orang	65.000.000	45 Orang	195.000.000
		X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang terkelola dengan baik	N/A	100%	1.087.000.000	100%	1.092.000.000	100%	1.077.000.000		3.256.000.000
		X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	27 Paket	5.000.000	27 Paket	5.000.000	27 Paket	5.000.000	81 Paket	15.000.000
		X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	1 Paket	90.000.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	70.000.000	3 Paket	250.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
										Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
		X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	30.000.000
		X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	3 Paket	750.000.000
		X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	1 Paket	380.000.000	1 Paket	380.000.000	1 Paket	380.000.000	3 Paket	1.140.000.000
		X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	10 Dokumen	22.000.000	10 Dokumen	22.000.000	10 Dokumen	22.000.000	30 Dokumen	66.000.000
		X	XX	01	206	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	30.000.000
		X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	100 Laporan	320.000.000	100 Laporan	325.000.000	100 Laporan	330.000.000	300 Laporan	975.000.000
		X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	N/A	100%	140.000.000	100%	45.000.000	100%	25.000.000		210.000.000
		X	XX	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	-	-	2 Unit	40.000.000
		X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	1 Paket	50.000.000		-		-	1 Paket	50.000.000
		X	XX	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	3 Unit	30.000.000
		X	XX	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	2 Unit	60.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	4 Unit	90.000.000
		X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	N/A	100%	502.500.000	100%	507.500.000	100%	513.000.000	100%	1.523.000.000
		X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	8.000.000	6 Laporan	23.000.000
		X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	38 Laporan	95.000.000	38 Laporan	100.000.000	38 Laporan	105.000.000	114 Laporan	300.000.000
		X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	36 Laporan	1.200.000.000
		X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola	N/A	100%	282.000.000	100%	262.000.000	100%	234.000.000	100%	778.000.000
		X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	27 Unit	170.000.000	27 Unit	170.000.000	27 Unit	170.000.000	27 Unit	510.000.000
		X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	90.000.000
		X	XX	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	8 Unit	4.000.000	8 Unit	4.000.000	8 Unit	4.000.000	8 Unit	12.000.000
		X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	1 Unit	18.000.000	1 Unit	18.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	41.000.000
		X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	2 Unit	50.000.000	1 Unit	30.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	95.000.000
		X	XX	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	30.000.000
											6.938.099.494		6.921.776.636		6.946.002.854		20.805.878.984

**CASCADING RAPPEDALITRANG
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2026**

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Sasaran Program	Indikator	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		
													2024	2025	2026
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappedalitbang	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4	4
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	2
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	350	350	350
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi Pegawai	Persentase Pegawai yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan	Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	3
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	15	15
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana yang terkelola dengan baik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	27	27	27
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	10	10
										Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	1
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	100	100
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	-
										Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	-	-
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Sasaran Program	Indikator	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target										
													2024	2025	2026								
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2								
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	2								
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	38	38	38								
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12								
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	27	27	27					
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				1	1	1								
							Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit				8	8	8								
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				1	1	1								
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				2	2	2								
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				2	2	2								
							Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPD yang selaras dengan RKPD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3	1	1
																		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	3	2	1
										Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara						1	1	1			
										Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara						2	2	2			
										Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan						1150	1050	1000			
										Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen						2	4	2			

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Sasaran Program	Indikator	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		
													2024	2025	2026
					Meningkatnya Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Persentase Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Tercapai	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimuat dalam Buku Profil	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang termuat dalam Buku Profil	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	1
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	12	12
										Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	3	3	3
							Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terimplementasinya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase hasil implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	1
										Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Renstra/Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Selaras dengan RPD/RKPD	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terpenuhinya Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang didampingi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	1
										Koordinasi Pelaksanaan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	1
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah		8	
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	8	8	8

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Sasaran Program	Indikator	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		
													2024	2025	2026
		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Kajian Litbang IPTEK yang dimanfaatkan untuk mendukung sasaran RPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terlaksananya tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Persentase Kesesuaian Penelitian dengan Arah Kebijakan Perencanaan RPKD	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Penelitian Strategis dan Pengelolaan Buletin Kelitbangan	Persentase Pelaksanaan Penelitian Strategis dan Pengelolaan Buletin Kelitbangan	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1
										Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	1	1
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya Hasil Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan dalam Perencanaan yang dimanfaatkan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan dalam Perencanaan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1		
										Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen			1
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Hasil Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam Perencanaan yang dimanfaatkan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam Perencanaan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen		1	
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Inovasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Inovasi Daerah	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1	1
										Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan			1
										Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Laporan			1

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini, akan dikemukakan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPDALITBANG) Kabupaten Lamandau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lamandau. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lamandau, sebagaimana dijabarkan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir RPD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Perencanaan	90,5	91	92	93	93
2.	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	20,5	21	22	23	23
3.	Persentase Inovasi hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja SKPD). Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Rencana Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap SKPD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Kabupaten Lamandau, Januari 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN LAMANDAU,



Drs. ABISUA, M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015